

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dunia internasional sekarang adalah dunia yang diwarnai oleh globalisasi. Semakin menyempitnya dunia akibat perkembangan teknologi, telekomunikasi, dan transportasi memunculkan kecenderungan similaritas dan uniformitas dari para individu, kelompok, dan sistem sosial yang melewati atau bahkan menghapus batas tradisional negara. Baik secara sosial, ekonomi, maupun politik, globalisasi telah memungkinkan terjadinya pergeseran *citizenship* dan kesetiaan dari keterikatan nasional ke dalam keterikatan global.²¹⁹ Lebih lanjut, globalisasi pun tidak hanya memunculkan kecenderungan similaritas dan uniformitas semata, tetapi juga memunculkan sejumlah tantangan dan peluang bagi aktor-aktor dalam dunia internasional. Sejumlah tantangan dan peluang yang tercipta dalam sistem internasional dengan corak globalisasi ini menyebabkan terbentuknya tren regionalisme dalam sistem internasional, yaitu dimana negara-negara dunia internasional turut menimbang lebih jauh mengenai penguatan kerjasama di kawasan dalam upaya menghadapi berbagai tantangan yang ada.

ASEAN sebagai kawasan yang tengah menggeliat untuk berkembang lebih jauh menuju integrasi regional yang lebih kuat dalam satu dasawarsa terakhir kemudian menjadi menarik untuk dianalisa. Dengan visinya *ASEAN Community 2015*, negara-negara anggota ASEAN berupaya menimbang penguatan kerja sama yang lebih utuh di kawasan, bukan hanya kerja sama ekonomi dan keamanan semata tetapi juga untuk menguatkan kerja sama di level masyarakatnya guna menghadapi sejumlah tantangan baru yang muncul dalam dunia internasional. Banyak yang kemudian menaruh harapan pada integrasi ASEAN ini akan menjadi sebuah bentuk entitas regional yang kuat, sebagaimana yang telah dicapai oleh Uni Eropa. Namun keberhasilan ASEAN untuk menjadi sebuah entitas regional yang kuat ini tidak akan berhasil apabila tidak muncul visi yang kuat serta peran

²¹⁹ Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 136.

kepemimpinan yang muncul dari negara anggotanya untuk mengarahkan proses integrasi regional yang sedang berlangsung.

Indonesia, sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara kemudian diharapkan dapat menjadi penggerak dari proses regionalisasi yang tengah berlangsung di ASEAN. Tidak dapat dipungkiri, peran Indonesia dalam diplomasi dan tata regional Asia Tenggara akan lebih besar daripada negara-negara ASEAN lain. Hal ini disebabkan Indonesia mempunyai modalitas yang besar untuk mengambil peran kepemimpinan di ASEAN, dilihat dari faktor historis Indonesia serta konteks Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di kawasan ASEAN. Oleh sebab itu, dalam bab-bab sebelumnya telah berupaya dilihat kaitan antara politik luar negeri yang dimainkan Indonesia dengan proses regionalisasi ASEAN. Bagi Indonesia sendiri, dengan peran yang maksimal di ASEAN dinilai akan mendatangkan stabilitas domestik dan manfaat bagi Indonesia dalam memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, penting bagi Indonesia untuk mempunyai arahan Politik Luar Negeri Indonesia di wilayah ASEAN.

Pada Bab 1 kemudian telah berupaya diangkat sebuah arahan teoretis mengenai bagaimana membangun sebuah regionalisme yang komprehensif lewat kerangka '*New Regionalism*' Bjorn Hettne. Pendekatan *New Regionalism* yang diungkapkan Hettne mengeksplor kerjasama dan integrasi *cross border* berdasarkan pemahaman komparatif, historis, dan *multilevel perspective*. Selain itu juga aspek-aspek sosio-kultural juga diperhitungkan dalam rangka menciptakan suatu kerjasama yang utuh dan kuat. Regionalisasi kemudian dilihat tidak hanya sebagai suatu proses kerjasama ekonomi semata tetapi melingkupi juga isu-isu seperti kebijakan sosial dan isu-isu keamanan. Secara umum fondasi teoretis *New Regionalism* adalah pemahaman sosial konstruktivis, *multi-level approaches*, dan studi pendekatan global seperti globalisasi dan *international order*. Dari ketiga fondasi *New Regionalism* Bjorn Hettne tersebut kemudian muncul beberapa variabel yang dapat mengkatalis terbentuknya sebuah regionalisme yang komprehensif, yakni *the notion of identity*; sosialisasi *norms and rules*; *multilevel governance/ actors*; *multilevel dimensions*; dan *international order*. Variabel-variabel inilah yang kemudian digunakan dalam melakukan

assessment terhadap Politik Luar Negeri Indonesia di ASEAN pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Lebih lanjut, dalam Bab II sebelumnya berupaya diperlihatkan bagaimana dinamika yang terjadi dalam ASEAN, khususnya yang terkait dengan perubahan visi ASEAN untuk menuju '*A People Oriented Organization*'. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab 2, lahirnya visi ASEAN *Community* 2015 yang berbasiskan pada masyarakat ini merupakan sebuah perjalanan panjang selama kurang lebih 42 tahun. Visi Komunitas ASEAN 2015 tersebut menandakan upaya pembangunan paradigma baru untuk membangun kawasan Asia Tenggara yang lebih maju, searah dengan tuntutan perubahan di masa mendatang dengan mewujudkan organisasi regional yang lebih berorientasikan pada masyarakat (*a people oriented organization*). Hal ini disebabkan sebelumnya ASEAN kerap dikritik sebagai sebuah organisasi regional yang elitis, dimana hanya menjadi ajang berkumpulnya para elit pemerintahan negara-negara Asia Tenggara.

Setelah melakukan tinjauan terhadap proses perubahan ASEAN dari '*A State Oriented Organization*' menjadi '*A People Oriented Organization*', kemudian bisa dilihat bahwasanya dari awal berdirinya ASEAN, organisasi ini sebenarnya diharapkan dapat menjadi jangkar yang menguatkan kerja sama negara-negara di Asia Tenggara. Fase awal berdirinya ASEAN, yaitu pada masa Perang Dingin, memperlihatkan visi dan prinsip yang melekat dalam organisasi ini adalah untuk memperkuat stabilitas regional kawasan, khususnya dalam menjaga kawasan Asia Tenggara untuk tidak menjadi arena pertempuran dua negara *superpower* yang tengah bertikai saat itu. Serangkaian dokumen dan traktat kerja sama pun disepakati, seperti Bali Concord I, ZOPFAN, TAC, dan SEANWFZ yang menegaskan *code of conduct* negara-negara anggotanya. Pada fase awal ini ASEAN terlihat telah berhasil muncul sebagai organisasi regional yang dapat menjaga stabilitas regional, walaupun kerja sama yang dominan mencuat adalah kerja sama di bidang politik-keamanan.

Perkembangan dunia internasional yang semakin kompleks pasca-Perang Dingin kemudian membuat negara-negara anggota ASEAN berupaya menguatkan kerja sama, tidak hanya di bidang keamanan namun juga bidang lainnya. Terbukti pasca-berakhirnya Perang Dingin, ada dua perkembangan yang dicapai ASEAN,

yakni dibentuknya forum ARF untuk membicarakan keamanan regional yang lebih komprehensif; serta hadirnya visi menuju perdagangan bebas di kawasan lewat AFTA. Akan tetapi, implementasi dari dua perkembangan yang dicapai ASEAN pasca-Perang Dingin tersebut bisa dikatakan berjalan cukup lambat. Baru setelah kawasan Asia Tenggara mengalami krisis ekonomi yang membesar menjadi krisis sosial-politik membuat negara-negara ASEAN lebih serius dalam mengupayakan terbentuknya sebuah kerja sama regional yang lebih kuat lagi di kawasan. Hadirnya visi ASEAN 2020 kemudian bisa dilihat sebagai respon negara-negara anggota ASEAN untuk menguatkan kerja sama di kawasan.

Visi ASEAN 2020 yang telah dideklarasikan dalam KTT Informal ASEAN ke-2 di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 1997 kemudian menjadi tonggak penting perjalanan ASEAN. Visi ini menjadi landasan yang kuat bagi upaya ASEAN merubah orientasinya yang terlalu bersifat level elit pemerintahan menjadi lebih kepada orientasi masyarakatnya. Lebih lanjut, dengan menyadari dinamika dunia internasional yang semakin kompleks pada awal abad ke-21, khususnya setelah terjadinya serangan teroris ke Amerika Serikat membuat negara-negara ASEAN berupaya mempercepat terbentuknya sebuah entitas regional yang kuat. Untuk menjawab seluruh spektrum tantangan baru tersebut, kemudian pada KTT ASEAN ke-9 di Bali Tahun 2003, diputuskanlah untuk membangun masyarakat ASEAN ke depannya yang berlandaskan pada tiga pilar, yakni Masyarakat Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community / ASC*), Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community / AEC*), dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community / ASCC*). Ketiga pilar ini akan saling terkait secara erat dan saling memperkuat dalam upaya mencapai perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bagi kawasan Asia Tenggara. Munculnya visi *ASEAN Community 2015* ini juga kemudian diharapkan dapat membuat ASEAN menjadi sebuah *a caring community*, yang lebih mendekatkan masyarakatnya terhadap ASEAN.

Bab 2 yang memberikan tinjauan terhadap dinamika perkembangan ASEAN menuju *a people oriented organization* diharapkan dapat menjadi sebuah poin awalan untuk masuk ke Bab berikutnya yang akan meninjau peran yang dijalankan Indonesia dalam mewujudkan entitas regional ASEAN yang lebih erat,

sebuah bentuk *'New Regionalism'*. Bahasan yang diberikan pada Bab 3 telah menganalisa apakah kegiatan yang dijalankan Indonesia tersebut memenuhi kerangka regionalisme yang kuat sebagaimana yang dijabarkan oleh Bjorn Hettne.

Analisa peran Indonesia pada fondasi sosial konstruktivis dapat dilihat dari indikator bagaimana Indonesia mendorong terciptanya identitas bersama di kawasan dan juga pada bagaimana Indonesia menyebarkan diskursus Piagam ASEAN yang menjadi sebuah *legally binding norms* dalam membentuk sebuah entitas regional. Peran Indonesia dalam mendorong terciptanya identitas bersama kemudian bisa dilihat dalam dua bagian besar, yakni bagaimana menjunjung nilai-nilai bersama dan bagaimana Indonesia mendorong kegiatan-kegiatan sosial budaya yang dapat meningkatkan tingkat kepekaan masyarakat terhadap ASEAN.

Peran yang dimainkan Indonesia dalam menjunjung identitas bersama ASEAN sebenarnya bisa dikatakan *well on track* karena Indonesia berhasil mengangkat dua nilai besar yang dapat menjadi identitas bersama ASEAN ke depannya, yaitu nilai demokrasi dan penegakkan HAM. Namun sayangnya, Indonesia dinilai tidak konsisten dalam menjunjung kedua nilai ini dalam mengimplementasikannya ke tataran kebijakan dan pengartikulasian sikap. Gambaran peran yang diberikan pada Bab 3 memperlihatkan bagaimana penjunjungan terhadap nilai-nilai bersama di ASEAN lebih kepada upaya memasukkannya dalam dokumen resmi ASEAN, namun minim dalam implementasinya.

Lebih lanjut, secara umum dapat dilihat bahwasanya karena ketidak-konsistenan terhadap kedua nilai yang seharusnya menjadi identitas bersama ASEAN tersebut, yang membuat 'kepemimpinan' Indonesia di ASEAN juga semakin terpuruk. Dalam hal menggalakkan kegiatan sosial budaya ASEAN di level masyarakat pun sebenarnya Pemerintah Indonesia telah cukup baik melaksanakannya. Terbukti dengan puluhan kegiatan bertema ASEAN yang dilaksanakan pada masa Pemerintahan SBY ini. Namun lagi-lagi sayangnya berbagai macam kegiatan tersebut tidak diikuti dengan adanya indikator yang jelas mengenai pencapaiannya di level masyarakat, sehingga terlihat bahwasanya tingkat kesadaran masyarakat terhadap manfaat yang akan diberikan ASEAN kepada masyarakat secara umum masihlah minim.

Peran yang dimainkan Indonesia dalam menyebarkan diskursus Piagam ASEAN ke level masyarakat pun terkendala dengan ketidakjelasan Piagam ASEAN sebagai sebuah norma bersama yang berlaku dalam sebuah entitas regional. Masih banyak kekurangan yang terdapat dalam Piagam ASEAN tersebut seperti misalnya belum mencakup sanksi yang akan diberikan apabila ada negara anggotanya yang melanggar Piagam tersebut. Rizal Sukma bahkan menyatakan bahwa Piagam ASEAN ini *'neither bold nor visionary'*, yang menegaskan bahwasanya Piagam ASEAN ini tidak akan membuat ASEAN melangkah lebih jauh ke dalam tahapan integrasi regional yang lebih kuat. Melihat kekurangan yang terdapat dalam Piagam ASEAN ini, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia mengambil inisiatif mengajak negara-negara anggota yang lain untuk menjadikan Piagam ASEAN ini lebih "bergigi" yang diharapkan dapat membuatnya sebagai *legally binding norms*. Namun, alih-alih melakukan hal tersebut Pemerintah Indonesia malah menganggap Piagam ASEAN ini sebagai sebuah dokumen politik yang tidak boleh mempunyai interpretasi yang jelas. Sehingga dengan demikian bisa dikatakan Pemerintah Indonesia belum menilai perlunya memiliki sebuah *legally binding norms* di kawasan.

Analisa peran Indonesia pada fondasi berikutnya, yakni *Multilevel Approaches*, dapat dilihat dari bagaimana Indonesia mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam proses-proses ASEAN dan bagaimana Indonesia bisa mengajak negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk juga membuka ruang yang lebih luas bagi *non-state actors*. Selain itu juga analisa peran Indonesia dapat dilihat bagaimana Indonesia bermain dan mengefektifkan kerja sama yang terdapat dalam ketiga pilar ASEAN *Community*.

Dalam hal mendorong keterlibatan masyarakat sipil, bahasan pada Bab 3 telah memberikan gambaran bagaimana Indonesia sebenarnya lebih maju dibandingkan negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam mengajak *non-state actors* terlibat dalam proses perumusan kebijakan Indonesia di ASEAN. Pemerintah Indonesia bisa dilihat pada Bab 3 tersebut melakukan inisiatif dengan mengadakan berbagai forum konsultasi dengan elemen masyarakat sipil, misalnya dalam kegiatan *'Deplu Foreign Policy Breakfast'*. Pemerintah Indonesia, lewat berbagai forum konsultasi yang dibuatnya, telah banyak meminta masukan dari

kalangan NGO, pebisnis, dan kalangan komunitas epistemik terhadap berbagai isu yang akan kemudian menjadi posisi dari Indonesia di ASEAN. Hal ini merupakan sinyalemen positif dari peran Indonesia pada fondasi Pendekatan Multilevel. Namun sayangnya, berbagai forum konsultasi yang dibuat Pemerintah Indonesia masih terkesan bersifat *ad-hoc* serta struktur yang disediakan Deplu tersebut pun dinilai masih kurang memadai, karena yang sering terjadi adalah konsultasi dilakukan hanya semata karena keharusan. Meskipun konsultasi dilakukan, hal tersebut tidak menjamin masukan masyarakat sipil menjadi bagian dari kebijakan. Peran Indonesia yang dilakukan dalam mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk membuka ruang keterlibatan masyarakat sipil pun bisa dikatakan masih kurang terlihat peranannya. Peran Indonesia dalam konteks *G to G* ini masih bersifat kompromi dan kurang menekankan pentingnya membuka keterlibatan elemen masyarakat sipil dalam upaya menciptakan entitas regional yang kuat. Hal ini khususnya terjadi dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara CLMV.

Sementara itu, peran yang dimainkan Indonesia pada ketiga pilar ASEAN *Community*, secara umum bisa dikatakan Indonesia banyak menunjukkan peran kepemimpinannya. Hal ini khususnya terlihat pada pilar Politik-Keamanan dimana Indonesia menjadi penggagas terciptanya pilar Politik-Keamanan dan banyaknya pasal-pasal dalam *Blueprint* APSC yang dimasukkan oleh Indonesia. Diantara pasal-pasal tersebut adalah pasal mengenai pembangunan politik yang demokratis, penegakkan terhadap nilai HAM, *good governance*, dan lain sebagainya. Pada pilar ekonomi, Indonesia juga telah mengupayakan sejumlah peraturan yang mempersiapkan terbukanya pasar di kawasan Asia Tenggara ke depannya. Sementara itu peran Indonesia pada bidang sosial-budaya bisa dilihat dari perannya dalam penyaluran bantuan pasca-Siklon Nargis di Myanmar, menyelenggarakan *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)* di Jakarta, dan mengajukan komite ASEAN untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak pekerja migran. Indonesia juga dinilai berupaya menggalakkan pembangunan identitas bersama ASEAN lewat berbagai kegiatan-kegiatannya.

Namun, terlepas dari berbagai peran yang dimainkan Indonesia pada ketiga pilar ASEAN *Community* ini, ada kelemahan mendasar yang terlihat secara umum, yakni bagaimana Indonesia masih lemah dalam mengimplementasikan berbagai kesepakatan yang telah dicapai. Peran yang dimainkan Indonesia dalam ketiga pilar tersebut umumnya baru sebatas penyampaian gagasan dan pencantuman gagasan tersebut ke dalam pasal-pasal yang terdapat dalam *blueprint* tiap pilarnya. Namun Indonesia belum dapat mengartikulasikan sikapnya yang mencerminkan gagasan-gagasan yang dilontarkannya pada saat perumusan *blueprint* ketiga pilar. Hal ini misalnya pada pasal ‘Promosi Demokrasi’ di pilar politik-keamanan, Indonesia belum bisa mengartikulasikan dirinya sebagai negara demokratis yang tidak menyenangi adanya pemerintahan otoriter. Terhadap Myanmar yang notabene adalah Pemerintahan Junta Militer, Indonesia masih bersikap lunak dan cenderung mengakomodir kepentingan Myanmar. Lebih lanjut, dalam pasal ‘Pembangunan Identitas’ ASEAN di pilar sosial budaya, Indonesia pun belum dapat mengimplementasikan gagasan pembangunan identitas ke dalam masyarakatnya. Infrastruktur pembangunan identitas di level masyarakat seperti misalnya penyusunan kurikulum yang lebih menekankan pada ASEAN masih belum dibuat hingga saat ini. Sementara itu, permasalahan umum yang terjadi pada peran Indonesia di pilar ekonomi adalah Indonesia masih kurang dalam mengakomodir kepentingan masyarakat kelas bawah semisal buruh dan petani di dalam kebijakan yang tercetus dalam pilar AEC. Indonesia lebih banyak dinilai mengakomodir kepentingan para pebisnis Indonesia untuk meluaskan pasarnya ke wilayah ASEAN lainnya.

Analisa peran Indonesia pada fondasi ketiga *New Regionalism* Bjorn Hettne, *International Order* kemudian lebih melihat bagaimana Pemerintah Indonesia mengangkat gagasan integrasi ASEAN di dalam forum-forum internasional. Mengenai peran Indonesia pada fondasi yang ketiga ini, dilihat bahwa Indonesia telah cukup baik perannya. Presiden SBY dinilai lebih aktif dalam menyuarakan peran Indonesia di dunia internasional dan menyuarakan pentingnya memiliki sebuah entitas regional yang kuat di kawasan. Lebih lanjut, Presiden SBY juga dinilai lebih aktif dalam menyuarakan Politik Luar Negeri Indonesia di ASEAN daripada dua presiden Indonesia sebelumnya, yakni Gus

Dur yang relasinya cenderung dekat dengan hubungan Barat-Timur dan Asia Pasifik, dan Megawati yang cenderung pasif terhadap polugri Indonesia. Hal ini kemudian memperlihatkan bahwa Pemerintah Indonesia memandang penting ASEAN sebagai arena yang dapat memberikan manfaat bagi Indonesia demi kemakmuran masyarakatnya.

Setelah memaparkan berbagai peran yang telah dimainkan Indonesia dalam setiap variabel *New Regionalism* Bjorn Hettne, Bab berikutnya kemudian berupaya memberikan analisa hubungan variabel tersebut guna memperlihatkan efektivitas peran Indonesia di ASEAN sejauh ini. Kerangka *New Regionalism* Bjorn Hettne sendiri sebenarnya telah menekankan pentingnya sebuah entitas regional yang kuat untuk mempunyai tiga karakteristik utama, yakni: 1) Hadirnya identitas bersama kawasan yang didasari pada *shared norms and values*; (2) Pendekatannya yang berorientasi pada masyarakat (*be people-centered*) serta mempunyai mekanisme dalam men-*tackle* berbagai macam dimensi isu; dan (3) Adanya sebuah entitas regional yang dapat muncul sebagai aktor internasional dengan segala kewenangan yang diberikan terhadapnya

Gambaran peran yang dimainkan Indonesia di ASEAN pada bab 3 kemudian memperlihatkan bahwasanya saat ini ASEAN masih belum memiliki ketiga karakteristik sebuah regionalisme yang komprehensif. Oleh sebab itu, sebenarnya melihat besarnya modalitas yang dimiliki Indonesia, negara ini seharusnya dapat memainkan peran *state-driven regionalization process* di ASEAN. Akan tetapi, Indonesia kemudian terlihat terjebak dengan peran-peran retorisnya di ASEAN selama ini. Indonesia sebenarnya secara umum bisa dikatakan telah cukup aktif mendorong terciptanya regionalisme ASEAN pada masa Pemerintahan SBY, dengan melihat sejumlah kegiatan dan capaian yang diungkapkan pemerintah Indonesia mengenai posisinya selama ini dalam membangun regionalisme ASEAN. Namun jika ditilik lebih jauh, peran yang dimainkan Indonesia tersebut sebenarnya tidaklah memiliki arahan yang jelas dan cenderung terlihat setengah hati. Hal ini terlihat dari tidak adanya indikator yang jelas mengenai efektivitas dari peran-peran yang selama ini dijalankan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan SBY dalam ASEAN. Selain itu, *gap* yang

tercipta antara capaian-capaian dan visi yang terdapat dalam dokumen resmi ASEAN dengan implementasinya pun begitu besar.

Pada akhirnya, uraian-uraian yang diberikan pada Bab 1 hingga Bab 4 mengenai peran Indonesia dalam mendorong regionalisme ASEAN telah membuktikan hipotesa awal yang diangkat dalam penelitian ini. **Bahasan yang telah diuraikan pada tiap Bab dalam penelitian ini telah membuktikan hipotesa bahwasanya "Peran Pemerintah Indonesia tidak maksimal dalam mendorong terciptanya regionalisme ASEAN"**. Peran yang kurang memadai dan kurang maksimal dijalankan Pemerintah Indonesia dalam mendorong terciptanya regionalisme ASEAN ini setidaknya disebabkan oleh dua hal utama, yakni: *Pertama*, tidak adanya *platform* Politik Luar Negeri Indonesia yang jelas di ASEAN, khususnya dalam mendorong terciptanya entitas regional yang kuat; *Kedua*, pemaknaan para Pemerintah Indonesia terhadap ASEAN ke depannya sebenarnya lebih kepada penguatan sebuah *regional cooperation* di kawasan, bukan kepada terciptanya sebuah *regional community*, sebagaimana yang didengung-dengungkan kepada masyarakat selama ini.

Oleh sebab itu, secara teoretis penelitian ini berupaya memberikan sumbangan pemikiran mengenai arahan / *platform* Politik Luar Negeri Indonesia di ASEAN. Dengan menghadirkan konsepsi regionalisme yang lebih komprehensif beserta indikator-indikator yang mesti dicapai dalam mewujudkan sebuah entitas regional yang kuat, analisa berdasarkan kerangka *New Regionalism* Bjorn Hettne telah memberikan sumbangan pada dunia akademis bahwa pembentuk regionalisme yang kuat juga bekerja melalui interaksi sosial yang konstitutif dengan menciptakan pemahaman identitas bersama. Sehingga titik tolaknya pun tidak hanya dalam mengembangkan kerja sama fungsional di bidang ekonomi, politik, dan keamanan semata, tetapi juga pengembangan kerja sama di bidang sosial budaya dalam menciptakan '*we feeling*' di *level grassroot*. Namun, penelitian ini juga memperlihatkan bahwasanya di samping arahan-arahan yang diberikan kerangka *New Regionalism* Bjorn Hettne dalam setiap fondasinya, sebuah regionalisme yang kuat tidak akan berhasil apabila tidak ada peran kepemimpinan dan visi serta persepsi yang sama dari para aktor di dalam kerangka regionalisme itu sendiri.

5.2 Rekomendasi

Dari paparan yang diberikan pada penelitian ini terlihat bahwasanya Pemerintah Indonesia lebih memainkan peran kepemimpinan yang sifatnya retorik dan tanpa arah dalam mendorong terciptanya regionalisme ASEAN. Oleh sebab itu, untuk lebih mengefektifkan peran yang dijalankan Indonesia di ASEAN, Indonesia perlu membangun suatu desain Politik Luar Negeri Indonesia di wilayah ASEAN, yang mempunyai arah dan substansi yang jelas untuk mendorong terwujudnya visi ASEAN *Community* 2015, sekaligus juga tetap menjunjung kepentingan nasionalnya. Kerangka *New Regionalism* yang memiliki arahan mengenai penciptaan sebuah regionalisme yang komprehensif kemudian bisa dilihat sebagai salah satu *platform* yang bisa digunakan Pemerintah Indonesia terkait upaya pendorongan proses regionalisme ASEAN.

Akan tetapi, kerangka *New Regionalism* Bjorn Hettne juga belum bisa dilihat sebagai *platform* pembentuk regionalisme yang terbaik untuk diterapkan di wilayah Asia Tenggara. Masih perlu penelitian lebih lanjut lagi mengenai apakah *New Regionalism* Bjorn Hettne merupakan *platform* pembentuk regionalisme yang terbaik di wilayah ASEAN. Namun, dari paparan penelitian ini mengenai peran Indonesia di ASEAN, penulis melihat setidaknya ada beberapa prasyarat yang harus ada dalam suatu wilayah agar penerapan kerangka *New Regionalism* Bjorn Hettne bisa berjalan lebih efektif, diantaranya adalah: tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik dan rendahnya tingkat kesenjangan kesejahteraan; tingkat pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya untuk dapat melihat peluang yang terdapat dengan hadirnya entitas regional yang kuat; serta stabilitas politik yang baik diantara negara-negara di wilayah.

Terlepas dari apa yang didapat penulis diatas, penulis menyadari untuk lebih memahami kerangka *New Regionalism* Bjorn Hettne secara lebih komprehensif, perlu elaborasi yang lebih mendalam lagi. Oleh sebab itu, penulis merekomendasikan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya mengenai sejauh mana kerangka *New Regionalism* bisa diterapkan sebagai kerangka berpikir pembangunan regionalisme yang efektif di suatu kawasan. Sehingga akan memberikan sumbangan yang konstruktif pula bagi pembangunan regionalisme di ASEAN ke depannya.